BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IDENTITAS ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PASCA PUTUSAN PENGADILAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 10/Pid.sus-anak/2021/PT.JMB)

A. Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pasca Putusan Pengadilan.

Penulisan putusan akhir dalam persidangan, tentu perlu adanya acuan baku yang harus diterapkan agar tidak melanggar syarat-syarat formil dalam beracara. Adapun segala sesuatu mengenai syarat-syarat putusan yang sah dapat dilihat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai tata cara dalam beracara pidana, salah satunya adalah tata cara penulisan putusan.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jika merujuk kepada KUHAP, putusan pengadilan mempunyai syarat yang harus dipenuhi agar putusan tersebut dapat dikatakan sah atau mempunyai kekuatan hukum yang bisa kita lihat pada pasal 195 KUHAP, dimana di situ dikatakan bahwa “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum

apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.”. Selain diharuskannya putusan untuk diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, selanjutnya dalam Pasal 196 KUHAP juga dikatakan bahwa memutuskan perkara, terdakwa wajib hadir dalam persidangan, apabila terdakwa tidak hadir maka penjatuhan putusan tersebut harus ditunda.

Selain syarat-syarat tersebut itu dalam menentukan sah atau tidaknya suatu putusan juga terdapat syarat-syarat formil yang tertera dalam pasal Pasal 197 ayat (1) KUHAP, antara lain:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan
- f. Pasal peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti
- j. Ketentuan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kelengkapan identitas terdakwa

baik Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa harus lengkap. Syarat-syarat tersebut wajib dipenuhi, karena jika salah satu syarat-syarat tersebut ada yang tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum sesuai dengan Pasal 197 ayat (2) KUHAP.

Identitas sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang, jati diri, atau bisa di sebut juga ciri-ciri yang membedakan antara satu orang dengan orang lain, baik itu nama, jenis kelamin, tanggal lahir, kebangsaan, dan pekerjaan tentunya memiliki perbedaan disetiap orang. Identitas merupakan hak bagi setiap orang, hal ini jelas tertulis dalam ketentuan Undang-Undang 32 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 5 yang berbunyi “setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”

Ketentuan mengenai pengertian identitas anak juga tertera di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 19 ayat 2 yang secara jelas mendefinisikan pengertian tentang identitas anak yaitu:

“identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkap jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi.”

Adapun yang dimaksud dengan Anak adalah Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12(dua belas) Tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun diduga

melakukan Tindak Pidana. Jadi yang dimaksud dengan identitas jika merujuk pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak adalah nama, nama orang tua, alamat, wajah sang anak.

Dalam perkara yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan ini adalah terdapat identitas anak yang terungkap atau terpublik secara terang-terangan di dalam putusan pengadilan Nomor: 10/Pid.sus-anak/2021/PT.JMB. Didalam putusan tersebut jelas identitas anak terungkap secara lengkap seperti nama anak terdakwa, tempat tanggal lahir, nama orang tua dan alamat.

Isu hukum yang pertama terkait dengan pencantuman identitas anak sebagai pelaku tindak pidana dalam putusan pengadilan melalui situs direktori putusan mahkamah agung. Hal ini melanggar beberapa ketentuan yang tertulis dalam Undang-Undang SPPA. Di mana dalam Undang-Undang SPPA ada ketentuan yang melanggar untuk mempublikasikan identitas anak.

Dalam prosedur peradilan pidana di indonesia, penulisan identitas terdakwa memanglah harus lengkap seperti yang sudah diterangkan sebelumnya dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Selain kelengkapan identitas, putusan pidana sendiri seperti yang sudah dikatakan sebelumnya memiliki kekuatan hukum jika dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan jika tidak dibacakan disidang terbuka maka putusan itu akan menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini merupakan perwujudan dari salah satu asas peradilan di indonesia yaitu asas sidang terbuka untuk umum.

Asas sidang terbuka untuk umum artinya segala sidang bentuk persidangan di lakukan secara terbuka untuk umum dengan maksud agar proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi, para ahli, barang bukti, dan terdakwa bisa dilihat oleh siapapun. Artinya tidak ada yang ditutup-tutupi. Proses tersebut menjadi prinsip dasar atau asas utama pada proses seluruh persidangan pengadilan di indonesia.

Dalam Asas sidang terbuka untuk umum ditegaskan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) yang berbunyi:

1. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
3. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Dari asas tersebut, dapat diambil sebuah kesimpulan dimana semua pemeriksaan persidangan dan pembacaan putusan pada Mahkamah Konstitusi, peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer wajib dilakukan dalam sidang secara terbuka. Keterbukaan proses peradilan ini merupakan salah satu cara checks and balances dan penerapan prinsip good governance supaya masyarakat juga turut andil dalam mengawasi perkembangan jalannya proses persidangan di Indonesia.

Kredibilitas dan transparansi sebuah badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan

mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri.

Kewajiban penyelenggaraan segala urusan publik secara transparan sendiri sudah diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebelumnya, MA telah mendorong transparansi peradilan sebagai pelaksanaan mandat Cetak Biru tahun 2003 dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua MA No. 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Selain itu, MA juga mengeluarkan Surat Keputusan Wakil Ketua MA No. 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi di MA-RI dan Surat keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan. Bahkan usaha untuk transparansi dan memberikan masyarakat akses terhadap informasi terhadap putusan-putusan pengadilan sudah diterapkan melalui dibentuknya laman website Direktori Putusan oleh Mahkamah Agung yang secara langsung dikelola oleh pihak Mahkamah Agung.

Adapun tata cara usaha untuk memberikan akses untuk mendapatkan informasi kepada masyarakat mengenai putusan-putusan pengadilan di Indonesia melalui laman website resmi Mahkamah Agung Direktori Putusan diatur dalam Surat Keputusan Ketua MA No. 144 Tahun 2007 tentang

Keterbukaan Informasi di Pengadilan, khususnya mengenai Jenis Informasi Yang Harus Diumumkan. Jenis informasi yang harus diumumkan terdapat pada bab III Pasal 6 Surat Keputusan Ketua MA No. 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yaitu:

1. Informasi yang harus diumumkan oleh setiap Pengadilan setidaknya meliputi informasi:
 - a. gambaran umum Pengadilan yang, antara lain, meliputi: fungsi, tugas, yurisdiksi dan struktur organisasi Pengadilan tersebut serta telepon, faksimili, nama dan jabatan pejabat Pengadilan non Hakim;
 - b. gambaran umum proses beracara di Pengadilan;
 - c. hak-hak pencari keadilan dalam proses peradilan;
 - d. biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta biaya hak-hak kepaniteraan sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan;
 - e. putusan dan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - f. putusan dan penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang belum berkekuatan hukum tetap dalam perkara-perkara tertentu.
 - g. Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama;
 - h. agenda sidang pembacaan putusan, bagi Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Kasasi;
 - i. mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai; hak masyarakat dan tata cara untuk memperoleh informasi di Pengadilan
2. Perkara-perkara tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f adalah:
 - a. korupsi
 - b. terorisme;
 - c. narkoba/psikotropika;
 - d. pencucian uang; atau
 - e. perkara lain yang menarik perhatian publik atas perintah Ketua Pengadilan.
3. Informasi yang harus diumumkan oleh Mahkamah Agung selain dari yang disebutkan dalam ayat (1) adalah:
 - a. Peraturan Mahkamah Agung;
 - b. Surat Edaran Mahkamah Agung;
 - c. Yurisprudensi Mahkamah Agung;
 - d. laporan tahunan Mahkamah Agung;
 - e. rencana strategis Mahkamah Agung;
 - f. pembukaan pendaftaran untuk pengisian posisi Hakim atau

Pegawai.”

Tata cara pengumuman Informasi diatur dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi :

“(2) Dalam hal pengadilan memiliki situs, pengumuman informasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf e dan f dilakukan dengan cara memasukkan kedalam situs Pengadilan yang bersangkutan;
(3) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan dengan cara memasukkan ke dalam situs Mahkamah Agung.”

Surat keputusan Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan juga turut mengatur mengenai kerahasiaan identitas anak, yang mana terdapat didalam konsiderans yaitu “Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan. Dirawat dan dijaga serta dilindungi kerahasiaannya”. Didalam Surat Keputusan Mahkamah Agung juga dijelaskan bahwa sebelum memberikan salinan Informasi kepada Pemohon atau memasukkannya kedalam situs web, PPID pelaksana wajib mengaburkan Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak dibawah ini dalam Putusan atau Penetapan Hakim dalam perkara sebagai berikut:

1. Mengaburkan identitas saksi korban dan saksi lainnya dalam perkara:
 - a. Tindak Pidana kesusilaan
 - b. Tindak Pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam Rumah Tangga;
 - c. Tindak Pidana yang menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban identitas saksi dan korban harus dilindungi; dan
 - d. Tindak Pidana lain yang menurut Hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.
2. Mengaburkan identitas hakim, panitera sidang, jaksa penuntut umum, penyidik, saksi, dan ahli dalam perkara Tindak Pidana terorisme baik keseluruhan isi putusan, SIP, dan sistem informasi

lainnya yang digunakan pengadilan.

3. Mengaburkan Identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Jadi menurut uraian ketentuan tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa baik putusan dan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maupun penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang belum berkekuatan hukum tetap dalam perkara-perkara tertentu harus diumumkan kepada public dengan cara memasukkan ke dalam situs dalam hal ini situs website Direktori Putusan. Atau mudahnya terdapat 2 (dua) kategori informasi dalam pelayanan Pengadilan, yakni:

1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala
2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik

Sebagai badan publik, sanksi bagi pengadilan yang dengan sengaja tidak memberikan informasi publik (putusan) terdapat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (“UU 14/2008”) yang berbunyi:

Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Namun demikian tidak semua informasi dapat di umumkan di dalam situs website Direktori Putusan khususnya informasi yang memuat identitas

korban, terdakwa atau terpidana dalam tindak pidana anak, hal ini tertera dalam Pasal 10 Surat Keputusan Ketua MA No. 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang berbunyi:

“Untuk perkara tindak pidana anak, pengadilan harus mengaburkan informasi yang memuat identitas korban, terdakwa atau terpidana sebelum memasukkan salinan putusan atau penetapan Pengadilan ke dalam situs sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) dan (3).”

Bahkan dalam aturannya lebih lanjut tepatnya pada Pasal 12, jika dirasa pengaburan informasi yang memuat identitas korban, terdakwa atau terpidana anak tidak dapat mencegah diketahuinya identitas pihak yang berperkara, saksi, korban, pihak terkait, terdakwa atau terpidana, maka Ketua Pengadilan bisa menetapkan agar putusan tersebut tidak di publikasikan. Hal ini merupakan perwujudan dari ketentuan dalam UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Pasal 59 ayat (1) dan (2) huruf b yang berbunyi:

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
2. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;

Yang selanjutnya perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dijelaskan lagi lebih rinci dalam pasal 64 huruf i yang berbunyi:

“i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.”

Bisa diambil kesimpulan bahwa Pasal 10 Surat Keputusan Ketua MA No.144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan merupakan salah satu cara bagi Mahkamah Agung untuk ikut serta dalam usaha memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara memasukkan aturan mengenai pelarangan mempublikasikan informasi yang memuat identitas anak yang berhadapan dengan hukum. Keterlibatan Mahkamah Agung dalam mengelola informasi putusan pidana anak dengan cara mengaburkan identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam Direktori Putusan ini juga sebagai Langkah pemenuhan dari Pasal 72 ayat (5) yang berbunyi:

“Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.”

Di Pasal ini dijelaskan bahwa media massa memiliki andil besar dalam penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak. Dalam penjelasan lebih lanjut mengenai Pasal 72 dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan “penyebarluasan informasi” adalah penyebarluasan informasi yang bermanfaat bagi Anak dan perlindungan dari pemberitaan identitas Anak untuk menghindari labelisasi, sedangkan yang dimaksud dengan “media massa” meliputi media cetak (surat kabar, tabloid, majalah), media elektronik (radio, televisi, film, video), media teknologi informasi dan komunikasi (laman/website, portal berita, blog, media sosial). Maka dapat dikatakan Mahkamah Agung sebagai pemilik

media teknologi informasi dan komunikasi website Direktori Putusan berperan penting dalam tidak dipublikasikannya putusan yang mencantumkan identitas anak yang berhadapan dengan hukum.

Pengaburan informasi yang memuat identitas korban, terdakwa atau terpidana sebelum memasukkan salinan putusan atau penetapan Pengadilan ke dalam situs Direktori Putusan tidak hanya merupakan implementasi dari UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang saja, namun juga merupakan implementasi dari Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

1. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik
2. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Dibuatnya ketentuan mengenai Penghindaran ter-publikasikannya Identitas anak yang berhadapan dengan hukum merupakan usaha untuk melindungi anak oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya terutama anak, baik dalam perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Karena itulah kemudian peraturan yang diberlakukan selalu melihat kepada dampak yang akan di timbulkan dalam kehidupan sang anak yang berhadapan dengan hukum di masa depan. Seperti yang diketahui dimana prinsip peradilan

pidana anak adalah Keadilan Restoratif, dimana ada usaha untuk bersama-sama memecahkan masalah untuk memulihkan keadaan seperti semula bukan pembalasan seperti pidana biasa.

Pengaburan identitas anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak yang melakukan tindak pidana, sesuai dengan penjelasan dari Pasal 72 adalah untuk menghindari lebelisasi. Dalam Teori Labeling (Labelling Theory) yang disampaikan oleh Tannenbaum, kejahatan dikatakan bukan sepenuhnya merupakan hasil dari kurang mampuan seseorang untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompok, akan tetapi dalam kenyataannya ia telah dipaksa untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya.³⁸ Jadi asal usul kejahatan tidak terletak pada karakteristik orang atau pelakunya, melainkan reaksi sosial yang dipandang sebagai penyebab utama perilaku penyimpangan. Pelabelan dan perlakuan dari masyarakat pada seseorang akan menyebabkan seseorang menerima identitas sebagai pelaku penyimpangan dan menolak self image konvensional. Transformasi identitas ini pada gilirannya menimbulkan komitmen pada peningkatan karier seseorang sebagai pelaku penyimpangan. Stigma yang ditentukan secara publik dapat mengucilkan seseorang dari kegiatan patuh norma dan pada gilirannya akan meningkatkan ketertarikan orang tersebut pada kegiatan-kegiatan penyimpangan.³⁹

³⁸Sambas, nandang, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen internasional Perlindungan anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 32

³⁹*Ibid.* Hlm.33

Schrag, menyimpulkan asumsi dasar teori labeling sebagai berikut:

1. Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang, melainkan karena ia ditetapkan demikian oleh penguasa.
2. Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labelling.

Karena itu anak yang sudah menjalin masa hukuman harus dibantu agar menghindari prasangka masyarakat salah satunya adalah dengan cara mengaburkan identitas anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak pelaku tindak pidana. Diharapkan dengan diberlakukannya ketentuan untuk mengaburkan identitas anak pelaku tindak pidana ini agar anak bisa kembali hidup dengan normal terhindar dari labelisasi agar dapat berkembang menjadi lebih baik, mempunyai masa depan yang lebih baik dan mencapai potensinya ketika menjalani kehidupan di dalam masyarakat, karena jika tidak demikian akan ada potensi seorang anak akan Kembali melakukan pelanggaran di kemudian hari diakibatkan labeling yang diberikan masyarakat pasca menjalani hukuman.

Namun seperti yang kita ketahui di jaman sekarang banyak sekali anak yang melakukan tindak pidana melebihi batas wajar, dan itu membuat masyarakat menjadi resah serta gelisah. Terkait pengkaburan identitas anak sebagai pelaku tindak pidana justru menjadi pro kontra bagi masyarakat. Salah satu contoh kasus Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak adalah pada kasus Dua remaja putri berusia 16 (enam belas) Tahun membunuh ayahnya sendiri di sebuah ruko pondok bambu, jakarta pada 24 juni 2024 akibat

tekanan mental dan merasa sakit hati terhadap ayahnya. Kasus ini menjadi perhatian masyarakat. Tidak hanya kasus ini banyak kasus lainnya yang lebih meresahkan masyarakat seperti, pemerkosaan, pencabulan, dan lainnya, hal ini tentu berpotensi membuka identitas anak sebagai pelaku melalui media sosial. Yang mana media sosial sendiri sering kali tidak mematuhi regulasi, sehingga identitas anak bisa tersebar luas, dan membuat anak menjadi sulit direhabilitasi karena stigma dari masyarakat yang mengetahui tentang kasusnya tersebut.

Melihat kondisi mental anak yang belum stabil dan dapat memunculkan rasa trauma terhadap anak atas stigma buruk dari masyarakat identitas anak sebagai pelaku tindak pidana harus tetap dirahasiakan, meskipun jenis tindak pidana yang dilakukan anak pada zaman sekarang semakin tidak wajar. Hal ini berdasarkan prinsip-prinsip hukum perlindungan anak yang diatur dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjunjung tinggi kepentingan terbaik bagi anak (*Best Interest of the child*).

Anak sering juga disebut sebagai seseorang yang belum memiliki kematangan emosional yang mana pada saat mereka melakukan tindak pidana tersebut emosionalnya masih terlalu labil dan intelektual yang memadai untuk sepenuhnya memahami dampak dari perbuatannya. Terpublikasinya identitas anak dapat menyebabkan stigma sosial yang berat, seperti:

1. Anak di pandang negatif oleh masyarakat, sehingga sulit mendapatkan pendidikan dan pekerjaan.
2. Menyebabkan isolasi sosial yang beresiko mendorong anak mengulangi tindak pidana.
3. Trauma psikologis berkepanjangan yang dapat memengaruhi perkembangan mental anak.

Memang, kasus-kasus saat ini seperti anak yang terlibat pembunuhan berencana, kejahatan seksual, atau penyiksaan sadis sering kali memicu debat publik. Masyarakat merasa bahwa tindakan anak tersebut tidak lagi bisa ditoleransi sehingga identitas mereka sebaiknya diungkapkan. Namun, membuka identitas anak dapat memiliki dampak negatif. Tidak menyelesaikan akar masalah, Penyebaran identitas tidak akan memulihkan korban atau mencegah kasus serupa. Lalu hal tersebut juga Mengabaikan faktor penyebab. Anak-anak yang melakukan tindak pidana berat sering kali adalah korban dari lingkungan yang buruk, seperti kekerasan dalam rumah tangga, tekanan sosial, atau kurangnya pendidikan. Solusi untuk Menangani Kasus yang Tidak Wajar adalah Proses Hukum Transparan (Tanpa Membuka Identitas Anak):

Media dan masyarakat dapat dilibatkan dalam pengawasan proses hukum tanpa mengungkap identitas anak, sehingga keadilan tetap terlihat tanpa melanggar hak anak. Pendekatan Penanganan yang Lebih Ketat, Untuk kasus tidak wajar, rehabilitasi harus lebih terfokus, seperti: Program terapi intensif untuk anak dengan gangguan perilaku. Pelibatan keluarga, psikolog,

dan lembaga masyarakat untuk memastikan anak mendapat dukungan penuh. Pendidikan Masyarakat Tentang Perlindungan Anak, Sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat tentang pentingnya melindungi identitas anak untuk mencegah dampak buruk jangka panjang.

Mengungkap identitas anak tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi merusak masa depan anak dan menciptakan siklus kejahatan yang lebih buruk. Oleh karena itu, identitas anak harus tetap dirahasiakan, dengan fokus pada rehabilitasi dan penyelesaian akar masalah, meskipun tindak pidana yang dilakukan anak terlihat tidak wajar. Perlindungan anak bukan berarti membenarkan perbuatan mereka, melainkan memberi mereka kesempatan untuk berubah dan berkontribusi positif di masa depan.

Peraturan mengenai penyembunyian Identitas anak yang berhadapan dengan hukum ini juga sebagai bentuk perwujudan kesadaran Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini prinsip yang menjadi titik acuan dari peraturan mengenai tidak boleh di publikasikannya Identitas anak adalah:

a. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak:

Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan social pemerintah maupun

swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan *legislative*, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Prinsip ini mengingatkan kepada semua peyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan meyangkut masa depan anak, bukan dengan tolok ukur orang dewasa, ataupun berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Mungkin menurut penegak hukum di Indonesia merupakan sebuah ketidakadilan ketika nama anak pelaku tindak pidana di kaburkan di dalam sebuah putusan yang di publikasikan dalam website dimana seharusnya putusan tersebut harusnya menjadi pengumuman kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk hukuman secara langsung. Namun demikian bukannya membuat anak sebagai pelaku tindak pidana jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi malah justru sang anak mengulangi perbuatannya tersebut akibat adanya labelisasi dan menyebabkan anak itu tidak mempunyai masa depan.

b. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Anak mempunyai hak asasi untuk hidup, untuk kelangsungan hidupnya dan untuk tumbuh berkembang sewajarnya. Prinsip ini tercantum dalam pasal 6 Konvensi Hak Anak ayat (1):

“Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.” Ayat (2): “Negara-negara pihak akan menjadi sampai batas maksimum kelangsungan hidup dan perkembangan anak.”

Dalam prinsip ini Negara mempunyai kewajiban untuk memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari Negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti Negara diharuskan menciptakan keadaan kondusif, juga sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar dalam menjalani hidup. Dalam hal ini negara juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak pelaku tindak pidana agar masih bisa mempunyai masa depan yang baik kedepannya. Usaha untuk melindungi masa depan anak adalah salah satunya dengan cara merahasiakan identitas anak yang berhadapan dengan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Prinsip perlindungan anak ini yang kemudian di adopsi oleh Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) menjadi prinsip dasar dari UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 (Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang) juga UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA guna memberi perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Terbukti dari prinsip peradilan pidana anak di Indonesia yaitu prinsip Keadilan Restoratif, dimana bukan bukan pembalasan yang dikedepankan tapi lebih ke pemecahan masalah untuk memulihkan keadaan sepertisemula untuk anak yang berhadapan dengan hukum agar anak tersebut masih memiliki kesempatan yang sama ketika nanti kembali ke dalam masyarakat.

Penerapan prinsip perlindungan anak tersebut dapat dilihat dalam tercantum dalam Pasal 2 UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir;
dan
- j. penghindaran pembalasan.

Namun baik dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak secara jelas mengatur mengenai kebijakan pengaburan identitas anak. Dalam kedua Undang-Undang tersebut, hanya diatur mengenai pengaburan identitas anak dalam pemberitaan media masa saja namun tidak di definisikan secara jelas pengertian media massa, apa saja yang masuk ke dalam kategori media masa dan apakah website Direktori Putusan merupakan bagian dari media massa yang dimaksud dalam pasal tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang berbunyi:

1. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
2. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 61 ayat 2:

“Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar”

Pada pasal 19 undang-undang sistem peradilan pidana anak hanya menuliskan identitas anak wajib dirahasiakan di media cetak dan elektronik. Dalam pasal tersebut jelas hanya mencantumkan wajib merahasiakan identitas anak pada media cetak dan elektronik hal tersebut membuat banyaknya kasus anak di jaman sekarang yang mengekspos identitas anak pada salinan putusan pengadilan yang telah di upload di website direktori putusan mahkamah agung, yang mana website tersebut dapat di akses oleh semua pihak. Seharusnya pada pasal tersebut di beri perluasan terhadap

merahasiakan identitas anak pada media cetak, elektronik dan website. Sehingga ada kejelasan undang-undang yang mengatur tentang wajib merahasiakan identitas anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak pelaku, anak korban dan anak saksi.

Namun demikian perlu diingat bahwa berhasil atau tidaknya usaha penegakan hukum yang ideal guna melindungi masa depan anak, tidak lepas dari kredibilitas dan kompetensi penegak hukum itu sendiri. Dalam teori *Lawrence Meir Friedman*, menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum salah satunya bergantung kepada Struktur Hukum/Pranata Hukum.⁴⁰ Jadi faktor kualitas penegak hukum memainkan peranan penting dalam memfungsikan hukum dengan sebaik-baiknya. Meski peraturan yang sudah ada sudah baik, namun tidak diimbangi dengan kualitas penegak hukum yang mumpuni yang bisa memahami asas peradilan anak dengan baik maka akan ada masalah dalam usaha perlindungan anak. Demikian juga, apabila kualitas penegak hukum baik namun tidak didukung dengan peraturan yang baik, maka kemungkinan munculnya masalah.

Dengan tidak mengaburkan identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam Salinan putusan yang di unggah ke dalam laman website Direktori Putusan, tentu saja merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai prinsip perlindungan anak yang terkandung dalam isi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang SPPA yaitu Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan

⁴⁰Slamet Tri Wahyudi, "*PROBLEMATIKA PENERAPAN PIDANA MATI DALAM KONTEKSPENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA*", Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM., Jakarta., hlm. 217

perkembangan anak serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan tidak mengaburkan identitas sang anak, berpotensi membuat identitas sang anak dikenali masyarakat umum di kemudian hari sehingga terjadilah labelling dimana pada akhirnya sang anak bisa menerima label yang diberikan masyarakat terhadap dirinya sebagai orang yang pernah berhadapan dengan hukum sehingga kelangsungan hidup anak tersebut berjalan dengan buruk dan tidak memenuhi potensinya malah cenderung berperilaku menyimpang dan dalam hal ini negara dan masyarakat yang turut bertanggung jawab dalam tumbuh kembang anak dapat dikatakan gagal untuk memberikan yang terbaik dalam kelangsungan hidup anak. Hal ini didukung dengan data pantauan Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), dimana terjadi peningkatan untuk kasus cyberbully sebesar 22,4% untuk korban dan 25,5% untuk pelaku anak yang identitasnya tersebar sebagai anak yang pernah berhadapan dengan hukum.⁴¹ Karena itulah pengaburann identitas anak yang berhadapan dengan hukum bukan merupakan hal yang sepele.

B. Penjatuhan Pidana Yang Dapat Di kenakan Terhadap Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Mengelola Website Direktori Putusan Mahkamah Agung

Isu hukum yang kedua adalah terkait sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pihak yang mempublikasikan Putusan yang mencantumkan identitas

⁴¹Alfian Mahendra, Beniharmoni Harefa “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IDENTITAS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA*”, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional., Jakarta., hlm.1631

anak sebagai pelaku tindak pidana pasca putusan pengadilan pada situs *website* Direktori Putusan Mahkamah Agung, dimana pihak yang mempublikasikan adalah pihak Mahkamah Agung. Pihak Mahkamah Agung mempublikasikan putusan tersebut sebagai usaha untuk keterbukaan informasi dalam pengadilan sehingga masyarakat luas dapat mengakses putusan dengan mudah lewat media elektronik.

Situs website Direktori Putusan sendiri merupakan website yang dikelola oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung yang bertujuan untuk mengelola serta mempublikasikan seluruh putusan sebagai langkah terwujudnya peradilan yang terbuka dan transparan. Dalam pelaksanaan pengelolaan situs website Direktori Putusan ini, panitera sebagai penanggung jawab situs website Direktori Putusan berpacu dengan peraturan yang terdapat dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi. Tanggung jawab Panitera dalam mengelola informasi ini tertera dalam Pasal 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi:

1. Setiap Pengadilan memiliki penanggungjawab dan petugas informasi dan dokumentasi.
2. Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ada pada Ketua Pengadilan.
3. Pada Mahkamah Agung, penanggungjawab adalah:

- b. Panitera, dalam hal informasi yang berhubungan dengan perkara;
 - c. Sekretaris, dalam hal informasi yang berhubungan dengan non perkara.
4. Petugas informasi dan dokumentasi adalah pegawai yang ditunjuk penanggungjawab untuk memberikan pelayanan informasi kepada publik.
 5. Fungsi petugas informasi dan dokumentasi dapat dilaksanakan oleh pegawai Pengadilan yang telah ada selama beban kerjanya memungkinkan, kecuali pada Mahkamah Agung akan ditunjuk petugas khusus.

Dalam pelaksanaan tugas Panitera Mahkamah Agung dalam mengelola situs website Direktori Putusan, menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya diwajibkan untuk adanya pengawasan terhadap pejabat struktural, pejabat fungsional dan aparatur di Mahkamah Agung yang ada di bawah wewenangnya di dalam pelaksanaan tugas agar meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas yang dapat dilihat di dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya:

Pasal 2

“Setiap atasan langsung wajib:

- a. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas dan perilaku bawahannya baik di dalam maupun di luar kedinasan secara terus menerus.
- b. Mengupayakan tersedianya sarana atau sistem kerja berdasarkan kewenangan yang dimiliki sehingga pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.”

Pasal 3

1. Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a dilaksanakan paling sedikit dengan:
 - a. memantau, mengamati dan memeriksa pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku secara berdayaguna dan berhasil guna;
 - b. meminta laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. mengidentifikasi dan menganalisis gejala-gejala dan penyimpangan serta kesalahan yang terjadi, menentukan sebab dan akibatnya serta cara mengatasinya;
 - d. merumuskan tindak lanjut dan mengambil langkahlangkah yang tepat sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kewenangan pejabat/instansi yang terkait; dan berkonsultasi kepada atasan langsungnya secara berjenjang dalam rangka meningkatkan mutu pengawasan yang dilakukannya.”
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
 - a. dilaksanakan dengan:
 - b. menjelaskan pembagian tugas, fungsi dan kewenangan bawahan dalam struktur organisasi di bawah kendalinya secara berkala;
 - c. menetapkan dan menyetujui sasaran kinerja bawahan serta memberikan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas capaian kinerja bawahan;
 - d. menjelaskan, membuat dan menyepakati prosedur atau cara pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang dinilai kurang jelas atau belum diatur secara khusus; dan
 - e. membina bawahan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik

Adapun hal-hal yang perlu diawasi dalam kinerja staff dibawah

wewenang Panitera Mahkamah Agung berada pada pasal 4 yang berbunyi:

1. Pengawasan perilaku bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan memantau:
 - a. ketaatan bawahan atas disiplin kerja yang ditetapkan; dan
 - b. ketaatan atas kode etik dan pedoman perilaku yang berlaku.
2. Atasan langsung wajib menentukan dan melaksanakan tindak lanjut yang sesuai dalam hal menemukan bawahan tidak memenuhi kewajiban dan larangan yang ditetapkan dalam ketentuan mengenai disiplin kerja dan kode etik dan pedoman perilaku yang berlaku.
3. Atasan langsung merekomendasikan tindak lanjut sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada atasannya secara berjenjang dalam hal tindak lanjut yang diperlukan di luar kewenangannya.”

Dari hal tersebut diketahui bahwa Panitera Mahkamah Agung dalam mengelola situs website Direktori Putusan wajibkan untuk adanya pengawasan terhadap pejabat struktural, pejabat fungsional dan aparatur di Mahkamah Agung yang ada di bawah wewenangnya di dalam pelaksanaan tugas agar meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan selalu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila terjadi sebuah pelanggaran yang ditemukan terhadap sebuah ketentuan yang berlaku dalam kinerja, pejabat struktural, pejabat fungsional dan aparatur yang berada di bawah wewenang Panitera Mahkamah Agung maka sesuai dengan Pasal 5 ayat 6 yang berbunyi:

Panitera Mahkamah Agung, Pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Utama dan/atau Madya wajib menonaktifkan sementara pejabat struktural, pejabat fungsional dan aparatur di Mahkamah Agung yang ada di bawah wewenangnya yang diduga melanggar disiplin kerja atau kode etik dan pedoman perilaku dan mengusulkan pemeriksaan lanjutan oleh Badan Pengawasan.

Panitera Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan tersebut dapat menonaktifkan sementara pejabat struktural, pejabat fungsional dan aparatur di bawah wewenangnya yang diduga melanggar disiplin kerja atau kode etik

dan pedoman perilaku dan kemudian mengusulkan pemeriksaan lanjutan oleh Badan Pengawasan.

Namun, apabila kewajiban pengawasan dan pembinaan oleh atasan dalam hal ini Panitera Mahkamah Agung, tidak terlaksana dengan baik, maka Panitera Mahkamah Agung selaku atasan yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dapat dikenai sanksi yang diatur dalam BAB III mengenai Pelanggaran, Sanksi dan Penghargaan tepatnya di Pasal 9 dan 10 yang berbunyi :

1. “Tidak dipenuhinya kewajiban pengawasan dan pembinaan oleh atasan langsung sebagaimana diatur dalam BAB II peraturan ini adalah pelanggaran yang dikenai sanksi administrasi ringan, sedang atau berat setelah diperiksa oleh pejabat yang berwenang.
2. Bentuk-bentuk sanksi ringan yang dapat dijatuhkan terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
3. Bentuk-bentuk sanksi sedang yang dapat dijatuhkan terdiri dari:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun;
 - c. pembebasan dari jabatan/Hakim non palu paling lama 6 (enam) bulan;
 - d. mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah; dan
 - e. pembatalan atau penangguhan promosi.
4. Bentuk-bentuk sanksi berat yang dapat dijatuhkan terdiri dari:
 - a. pembebasan dari jabatan/Hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan;
 - b. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 tahun;
 - c. pemberhentian dengan hormat; dan
 - d. pemberhentian tidak dengan hormat.
5. Tunjangan kinerja untuk pegawai yang dibebaskan dari jabatannya, tidak dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Tunjangan jabatan Hakim dan tunjangan jabatan struktural/fungsional, tidak dibayarkan selama yang bersangkutan menjalani hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Pasal 10

1. “Pemeriksaan atau pemantuan atas pelaksanaan pengawasan dan pembinaan atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dilakukan:
 - a. dalam setiap pemeriksaan yang bersifat rutin oleh aparat pengawasan fungsional, Hakim tinggi pengawas daerah di pengadilan tingkat banding atau Hakim pengawas bidang di pengadilan tingkat pertama dan banding;
 - b. terhadap atasan langsung dari Hakim dan aparatur yang ditemukan melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas, pelanggaran disiplin kerja, atau pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku.
2. Dalam hal atasan langsung selaku terperiksa lalai memenuhi kewajiban pengawasan dan pembinaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), yang bersangkutan dijatuhi sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) sampai dengan ayat (6).
3. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sampai dengan ayat (6) diusulkan oleh Tim Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana disebutkan dalam ayat
5. Tidak mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang dapat dikenakan kepada Terperiksa.”

Jadi selain Panitera Mahkamah Agung yang terbukti tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai atasan untuk mengawasi dan membina pejabat struktural, pejabat fungsional dan aparatur yang berada di bawah wewenangnya, maka Panitera Mahkamah Agung dapat dikenai sanksi ringan, sanksi sedang, maupun sanksi berat. Bahkan tidak menutup kemungkinan jika kelalaian yang dibuat oleh pihak Panitera Mahkamah Agung selaku atasan yang memiliki tanggung jawab dalam pengawasan terhadap pejabat fungsional dan aparatur yang berada di bawah wewenangnya melanggar ketentuan pidana, maka Panitera Mahkamah Agung bisa dikenai pidana jika ada ketentuan pidana yang mengatur.

Tidak adanya ketentuan yang secara jelas mengenai hukuman yang dapat dikenakan terhadap kelalaian dalam mengaburkan identitas anak dalam putusan yang di publikasikan dalam website Direktori Putusan seringkali menjadi masalah. Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi pun tidak menjelaskan mengenai sanksi yang dapat dikenakan jika melanggar ketentuan untuk mengaburkan identitas anak. Ketidak jelasan peraturan ini juga dapat ditemui dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

1. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik”

Dalam ketentuan tersebut, tidak secara jelas menjelaskan yang dimaksud dengan media cetak ataupun elektronik itu ruang lingkupnya apa saja, apakah laman website Direktori Putusan juga termasuk kategori media cetak ataupun elektronik atau hanya bagian pemberitaan media swasta saja, Namun dalam Pasal 97 UU SPPA mengatakan bahwa:

“Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Kata “Setiap Orang” dalam undang-undang tersebut merupakan subyek hukum utama yang menjadi sasaran dari undang-undang tersebut (addressaat

norm) merujuk kepada orang perorangan (manusia; natural person) maupun suatu badan hukum/korporasi (*legal person*).⁴²

Badan hukum/korporasi menurut Chindir Ali merupakan suatu perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di depan hakim.⁴³ Yang menjadi perbedaan dengan manusia adalah korporasi/badan hukum tidak dapat dikenakan pemidanaan berupa pidana yang merampas kemerdekaan badan (penjara). Tapi dalam hal tersebut bukan berarti menjadikan korporasi/badan hukum tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakannya. Hal ini diatur dalam Pasal 23 Perma nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi juga diatur bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus (individu), atau Korporasi dan Pengurus (individu), baik secara alternatif maupun kumulatif.

Adapun sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi menurut pedoman yang digariskan dalam Pasal 25 ayat (1) Perma nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi adalah pidana pokok yaitu pidana denda dan/atau pidana tambahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, yaitu Pasal 10 KUHP

⁴²http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/467_Perumusan%20KetentuanPidana.pdf

⁴³Chidir Ali. *Badan Hukum*. Alumni. Bandung: 1987, hlm, 19

dan ketentuan jenis pidana lain yang tersebar dalam undang-undang lain sebagai *lex specialis* dari KUHP yang merupakan *legi generalis*.

Kepaniteraan Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi merupakan aparatur tata usaha negara yang dipimpin oleh seorang Panitera yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung.⁴⁴ Dalam hal ini dapat disimpulkan jika terjadi kelalaian oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung dalam pengaburan identitas anak, maka baik pengurus maupun Kepaniteraan Mahkamah Agung selaku penanggung jawab dalam hal pengelolaan informasi dan dokumentasi milik Mahkamah Agung dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 97 UU SPPA, yaitu paling lama 5 tahun penjara untuk pengurus yang terbukti lalai, sedangkan untuk Kepaniteraan Mahkamah Agung dapat dikenakan sanksi denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Tetapi nyatanya pada undang-undang SPPA tidak ada mengatur secara jelas terkait sanksi terhadap kelalaian pegawai saat mengupload salinan putusan pada website direktori putusan mahkamah agung, sehingga hal ini masih menjadi permasalahan sampai sekarang. Dengan tidak adanya sanksi pidana terhadap pegawai yang lalai maka semakin banyak pula identitas anak yang terekspos pada putusan di website tersebut hal ini tentunya melanggar prinsip hak anak. Anak yang

⁴⁴<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/profile-kepaniteraan/tugas-dan-wewenang>

berhadapan dengan hukum ketika kembali kemasyarakat menjadi mendapatkan stigma buruk dari masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Hal ini tentunya membuat anak merasa di intimidasi dan trauma. Seharusnya pada undang-undang sistem peradilan anak dan perlindungan anak menambahkan pasal yang memuat sanksi terhadap semua orang yang mempublish identitas anak baik di media cetak, elektronik maupun website/ internet.